

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur daerah di 25 OPD Kabupaten Purbalingga dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dan diperoleh 143 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja telah diterapkan dengan baik, pemerintah daerah telah melakukan perencanaan anggaran hingga evaluasi kinerja. Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik akan dapat mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan anggaran secara efektif sehingga hasil kinerja instansi dapat meningkat pula.
2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi hasil kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Sistem pelaporan yang baik dapat mengkomunikasikan hasil kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasarannya sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pada setiap instansi pemerintah.

3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian akuntansi yang optimal maka informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin valid dan akurat, dengan demikian instansi dapat melakukan penilaian risiko pada setiap kemungkinan timbulnya pelanggaran pada sistem dan prosedur akuntansi. Dengan adanya pengendalian akuntansi yang optimal, perencanaan program dan kegiatan akan dapat berjalan dengan lebih baik serta akan mendorong dan meningkatkan upaya instansi dalam mencapai target yang ditetapkan sehingga akuntabilitas kinerja akan semakin meningkat pula.
4. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aparatur yang berkompeten dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan jabatannya serta didukung dengan sikap kerja yang baik maka kinerja instansi akan lebih optimal sehingga visi, misi, dan tujuan instansi dapat tercapai serta hasil kinerja instansi dapat meningkat pula.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan uji

koefisien determinasi nilai *adjusted* $R^2 = 0,45$ yang berarti variabel anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 45% dan sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Implikasi hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan masalah yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Setiap OPD di Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan pelaksanaan evaluasi secara sistematis dan terjadwal baik evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan maupun evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran agar pengalokasian anggaran dapat lebih sesuai dengan skala prioritas atau kebutuhan dan hambatan atas pelaksanaan kinerja dapat terpantau dengan baik. Selain itu, setiap OPD perlu menetapkan target atau jangka waktu untuk melaksanakan suatu tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan sehingga tidak terjadi keterlambatan koreksi yang menyebabkan lemahnya kinerja pegawai dan OPD dapat melakukan perbaikan perencanaan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Setiap OPD juga perlu mengadakan program pengarahan dan pelatihan yang lebih efektif guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman aparatur sehingga kompetensi aparatur pemerintah dapat lebih maksimal dan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga.

5.2. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam proses perizinan penelitian memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan dilakukan melalui *email* sehingga ada kemungkinan tertumpuk dan tidak terbaca. Terdapat pula OPD yang tidak memberikan izin untuk dijadikan responden penelitian.
2. Kesulitan dalam mengumpulkan kembali kuesioner dikarenakan mengingat kesibukan dari responden, beberapa kuesioner kembali dalam waktu yang cukup lama.
3. Subjek penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD Kabupaten Purbalingga, sehingga akan terdapat perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada subjek yang berbeda.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka berikut saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, agar dapat lebih memperhatikan waktu dalam penyebaran kuesioner serta melakukan monitor secara berkala supaya kuesioner tidak tertumpuk dengan dokumen lain, sehingga waktu pengumpulan data dapat lebih singkat.
2. Bagi aparatur pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran bagi pemerintah daerah guna meningkatkan anggaran berbasis kinerja,

sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Daerah*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Agustin, K. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta)*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- COSO. (2013). *Internal Control — Integrated Framework Executive Summary*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____, & Kusufi, M. S. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF E.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, 305-308.

Kesuma, D. P., Anwar, C., & Darmansyah. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*, 1(2), 141–146.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Purbalingga tahun 2019. <https://www.purbalinggakab.go.id/>, diakses 12 September 2021.

LAN dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance-modul 1 sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

_____. (2005). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Yogyakarta: Andi.

_____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4)*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia.

Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta.

- Putri, V. A. (2018). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKI)*. Skripsi: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Samosir, T. K. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Silalahi, E. B. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan Edisi Perdana*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Jakarta: Rajawali Pers.